

**PENGARUH PENGAWASAN FUNGSIONAL, PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN
TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK
(Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kabupaten Siak)**

Oleh :

Shella Lolita Diti Aprilia

Pembimbing : Nur Azlina dan Rusli

Faculty of Economics, Riau University Pekanbaru, Indonesia

E-mail : shella.lolita12@gmail.com

*The Effect of Functional Supervision, Financial Report Presentation and
Financial Report Accessibility on Public Accountability
(Empirical Study In SKPD Siak)*

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of the functional supervision, financial report presentation and financial report accessibility on public accountability. Population and sample in this research was in the SKPD Siak. Collecting data using primary data, the questionnaire using purposive sampling technique. The hypotheses then tested is multiple linear regression analysis by using SPSS version 21.0. The results of this study were 1)Functional supervision effect on public accountability. 2) Financial report presentation effect on public accountability. 3) Financial report accessibility effect on public accountability. The influence of Functional supervision, Financial report presentation, and Financial report accessibility are 78,2% while the remaining 21,8 % is influenced by other variables.

Keywords:Public Accountability, Functional Supervision, Financial Report Presentation, Financial Report Accessibility.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat (4) dan Pasal 56 ayat (4), yang kemudian diatur dalam pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur/ Bupati/ Walikota dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna

Anggaran/ Pengguna Barang dalam menyampaikan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan, harus disertai dengan pernyataan tanggung jawab. Pernyataan tanggung jawab tersebut harus menyatakan bahwa laporan keuangan itu isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah

(*agent*) untuk memberi pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. (Mardiasmo, 2002 :20).

Pada kenyataannya LKPD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2014 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Dari berbagai informasi yang ada, ternyata didalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak masih banyak disajikan data yang tidak sesuai. BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu:

- (1) Penyajian piutang daerah belum berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value/NVR). Nilai penerimaan piutang daerah per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 315.428.551,00.
- (2) Pengelolaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Siak per 31 Desember 2014 belum memadai. Nilai aset tetap per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 9.350.563.403.808,73.

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu:

- (1) Dasar hukum penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Siak pada BUMD belum didukung dengan Peraturan Daerah
- (2) Terdapat kekurangan penerimaan dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) PT Indah Kiat Pulp Paper pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan, dan Aset Daerah (PPKAD)(pekanbaru.bpk.go.id).

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2015, BPK memberikan opini WTP atas LKPD tahun 2015 diberikan kepada Kabupaten Siak. Opini ini diberikan atas dasar kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan telah cukup dan bebas dari salah saji yang material (pekanbaru.bpk.go.id).

Selain itu, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI mengungkapkan bahwa pada umumnya pengawasan atasan langsung masih lemah, sehingga masih ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan atasan langsung. (LHP BPK-RI, 2015).

Berdasarkan fenomena tersebut menjelaskan bahwa masih adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern yang menandakan masih terdapat kekurangan dalam pengawasan fungsionalnya, dimana pelaksanaan pengawasan fungsional yang efektif akan menghasilkan pelaporan yang baik yaitu dalam laporan keuangan daerah maupun kinerja dari aparat pemerintah daerah dan akan mewujudkan peningkatan akuntabilitas publik. Kemudian dijelaskan juga bahwa masih adanya kelemahan dalam penyajian laporan keuangan dan pengelolaan aset tetap yang belum memadai yang menandakan kinerja entitas belum sepenuhnya menyajikan laporan

keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, dimana penyajian laporan keuangan yang belum lengkap dan tidak aksesibel akan berdampak pada peningkatan terwujudnya akuntabilitas publik. Meskipun temuan tersebut masih dalam batas materialitas dan tolerable error yang dapat diterima, sehingga tidak mempengaruhi pemberian opini WTP yang diberikan BPK.

Berdasarkan penjelasan dan isu tersebut terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi akuntabilitas publik yaitu pengawasan fungsional, penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan.

Akuntabilitas publik dapat terwujud dengan adanya pelaksanaan pengawasan fungsional intern yang efektif. Dengan adanya pengawasan fungsional dimaksudkan untuk mencegah tumbuhnya berbagai macam bentuk penyimpangan dari pelaksanaan anggaran.

Laporan keuangan yang disajikan pemerintah harus mengandung informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami serta terbuka terhadap masyarakat. Semakin baik penyajian laporan keuangan dari pemerintah daerah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas publik.

Terkait dengan adanya laporan keuangan masyarakat menuntut adanya aksesibilitas yang mudah dan terpercaya. Aksesibilitas dalam laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan.

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suratmi, Ni Made (2014) mengenai Pengaruh audit kinerja, penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas publik. Pada penelitian ini, peneliti mengganti variabel audit kinerja dengan variabel pengawasan fungsional karena dari beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil. Variabel pengawasan fungsional diambil dari penelitian Laksana dan Handayani (2014) mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengawasan fungsional, dan pelaporan kinerja terhadap akuntabilitas publik di Kabupaten Batang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) apakah pengawasan fungsional berpengaruh terhadap akuntabilitas publik? (2) apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas publik? (3) apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas publik?

Tujuan penelitian ini antara lain: (1) Menguji pengaruh Pengawasan Fungsional terhadap Akuntabilitas Publik daerah Kabupaten Siak. (2) Menguji pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Publik daerah Kabupaten Siak. (3) Menguji pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Publik daerah Kabupaten Siak.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah

untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya daripada memberantas korupsi (Mardiasmo, 2009). Terwujudnya akuntabilitas publik merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut (Bastian, 2010):

1. Harus ada komitmen pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah, perlu melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.

5. Harus jujur, objektif, transparan, dan aktif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemuktahiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Menurut Mahmudi (2007:9), terdapat 5 dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi organisasi sektor publik, yaitu:

- (1) Akuntabilitas hukum dan Akuntabilitas kejujuran
- (2) Akuntabilitas manajerial.
- (3) Akuntabilitas program
- (4) Akuntabilitas kebijakan
- (5) Akuntabilitas finansial

Pengawasan Fungsional

Menurut Wasistiono (2010:142) pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah daerah maupun yang berasal dari lingkungan eksternal pemerintah daerah.

Tujuan pengawasan menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Pasal 1 ayat 1 yaitu, Pengawasan bertujuan mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan.

Secara umum tujuan pengawasan adalah untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalansesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintah yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan (Bastian, 2009:15).

Menurut PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, komponen laporan yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut: (a)Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b)Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); (c)Neraca; (d)Laporan Operasional (LO); (e)Laporan Arus Kas (LAK); (f)Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g)Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan, menurut Bastian (2006), yaitu terdapat empat karakteristik kualitatif pokok, antara lain: relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami.

Aksesibilitas Laporan Keuangan

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk memahaminya (Henly *et al*, 1992, dalam Rohman, 2009).

Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SKID).

Pengaruh Pengawasan Fungsional terhadap Akuntabilitas Publik

Menurut Deddy dan Sherly (2010) dalam Wulandari (2013) menyatakan pengawasan fungsional akan menunjang akuntabilitas publik.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dengan dilakukannya pengawasan oleh aparat pengawas fungsional maka hal tersebut akan berpengaruh signifikan dalam menunjang akuntabilitas publik, dikarenakan tujuan pelaksanaan umum pemerintahan dan pembangunan berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dipertanggung jawabkan terhadap publik. Jika pengawasan fungsional dilaksanakan dengan baik, maka akan tercipta akuntabilitas publik yang baik juga. Penjelasan diatas didukung juga oleh penelitian Cici Rahayu (2011) yang menyatakan bahwa pengawasan fungsional secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik.

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Publik

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan (Bastian, 2009:15). Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akutabilitas sektor publik (Mardiasmo, 2002).

Laporan keuangan yang dihasilkan dalam peningkatan akuntabilitas publik harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan

dikatakan memenuhi standar apabila laporan keuangan yang dihasilkan memenuhi karakteristik kualitatif informasi yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Jadi semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas publik. Penjelasan diatas didukung juga oleh penelitian Ni Made Suratmi, Nyoman Trisna Herawati, dan Nyoman Ari Surya Darmawan (2014) yang menyatakan penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik.

Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Publik

Dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 103, dinyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah (SIKD) adalah data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat. Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada *stakeholder* secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, misalnya dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, internet, atau cara lainnya.

Dimana pemerintah melalui aksesibilitas laporan keuangan dapat menunjukkan akuntabilitas kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang mengandalkan informasi dalam laporan keuangan. Sehingga dengan melalui aksesibilitas laporan keuangan, akuntabilitas publik dapat ditingkatkan. Penjelasan di atas

didukung juga oleh penelitian Yudi Kristianto (2011) yang menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas publik.

Hipotesis Penelitian

H1: Pengawasan fungsional berpengaruh terhadap Akuntabilitas publik.

H2: Penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas publik.

H3: Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Siak. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016. Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Siak. Pemilihan sampel penelitian ini didasarkan pada metode *purposive sampling*, dimana yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah kepala SKPD, Kepala Bagian Akuntansi/ Keuangan dan Staf Subbagian Akuntansi/ Keuangan yang ada di SKPD Kabupaten Siak sebanyak 28 SKPD. Sehingga responden dalam penelitian ini berjumlah 84 orang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertamanya. Data primer berupa jawaban langsung dari penyebaran kuesioner yang dibagikan kepada responden.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda yang

digunakan untuk mengukur antara variabel independen (pengawasan fungsional, penyajian laporan keuangan, dan aksesibilitas laporan keuangan) terhadap variabel dependen (akuntabilitas publik). Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y= Akuntabilitas Publik

a= Konstanta

b₁b₂b₃= Koefisien Regresi

X₁= Pengawasan Fungsional

X₂= Penyajian Laporan Keuangan

X₃= Aksesibilitas Laporan Keuangan

e= Standar Error

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Akuntabilitas Publik (Y)

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009).

Setiap pertanyaan dari variabel yang dimiliki menggunakan skala Likert dan masing-masing butir pertanyaan diberi skor 1 sampai 5. Akuntabilitas publik diukur dengan menggunakan instrumen kuesioner yang digunakan dalam penelitian terdahulu oleh Yudi Kristianto (2011).

Pengawasan fungsional (X₁)

Pengawasan fungsional menurut Wasistiono (2010) adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik

yang berasal dari lingkungan internal pemerintah daerah maupun yang berasal dari lingkungan eksternal pemerintah daerah. Pengawasan fungsional diukur menggunakan kuesioner yang diajukan kepada responden, pengukuran variabel pengawasan fungsional diadopsi dari Indah Wulandari (2013).

Penyajian laporan keuangan (X₂)

Penyajian Laporan Keuangan (independent variabel) merupakan penyajian informasi keuangan pemerintah daerah yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penyajian laporan keuangan diukur menggunakan kuesioner yang diajukan kepada responden, pengukuran variabel penyajian laporan keuangan diadopsi dari Wahida N (2015).

Aksesibilitas laporan keuangan (X₃)

Aksesibilitas merupakan penunjang untuk memfasilitasi masyarakat dalam hal mengetahui laporan keuangan pemerintah di mana pemerintah memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk dapat melihat dan meninjau laporan keuangan pemerintah setiap tahunnya agar masyarakat dapat mengetahui kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan sehingga masyarakat dapat menilai mana laporan yang salah dan mana laporan yang benar (Akbar, 2013). Aksesibilitas laporan keuangan diukur menggunakan kuesioner yang diajukan kepada responden, pengukuran variabel aksesibilitas laporan keuangan diadopsi dari Peggy Sande (2013).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Statistik Deskriptif

Gambaran mengenai variabel-variabel penelitian yaitu pengawasan fungsional, penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, akuntabilitas publik disajikan dalam tabel *descriptive statistics* yang menunjukkan angka minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi yang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini :

Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas Publik	68	41	67	56,69	5,554
Pengawasan Fungsional	68	35	60	49,44	6,151
Penyajian Laporan Keuangan	68	23	45	37,47	5,009
Aksesibilitas Laporan Keuangan	68	6	15	10,16	2,217
Valid N (listwise)	68				

Sumber : Data Olahan 2017

Hasil Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan bantuan program SPSS. Jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid. Pada penelitian ini diperoleh $df = 68 - 2 = 66$ dengan tingkat signifikan 5%. Nilai r_{tabel} dengan derajat bebas (df) 66 adalah 0,239. Seluruh item pertanyaan dinyatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Hasil Uji Reliabilitas

Pengukuran reliabilitas penelitian ini dilakukan dengan cara *one shot* atau pengukuran sekali saja. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya *Cronbach Alpha* pada seluruh variabel baik variabel pengawasan

fungsional, penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan akuntabilitas publik lebih besar dari 0,60 sehingga disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini reliabel.

Hasil Uji Normalitas Data

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Akuntabilitas Publik	Pengawasan Fungsional	Penyajian Laporan Keuangan	Aksesibilitas Laporan Keuangan
N	68	68	68	68
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	56,69	49,44	37,47
	Std. Deviation	5,554	6,151	5,009
Most Extreme Differences	Absolute	,132	,157	,105
	Positive	,072	,107	,066
	Negative	-,132	-,157	-,105
Kolmogorov-Smirnov Z	1,087	1,298	,867	1,163
Asymp. Sig. (2-tailed)	,188	,069	,440	,133

Sumber : Data Olahan2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai **Assymp Sig Kolmogorov-Smirnov** (K-S) lebih besar dari 5% (0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi secara normal.

Hasil Uji Multikolinieritas

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinieritas Data

Model		Collinearity Statistics		Kesimpulan
		Tolerance	VIF	
1	Pengawasan Fungsional	,354	2,828	Tidak terjadi Multikolinieritas
	Penyajian Laporan Keuangan	,358	2,793	Tidak terjadi Multikolinieritas
	Aksesibilitas Laporan Keuangan	,738	1,355	Tidak terjadi Multikolinieritas

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Publik

Sumber : Data Olahan2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa keseluruhan nilai tolerance yang dihasilkan dalam penelitian ini

berada diantara 0,1-1,0 dan nilai VIF diantara 1,0-10. Dengan demikian dapat dijustifikasi bahwa keseluruhan variable bebas yang digunakan dalam penelitian terbebas dari asumsi multikolinieritas.

Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi

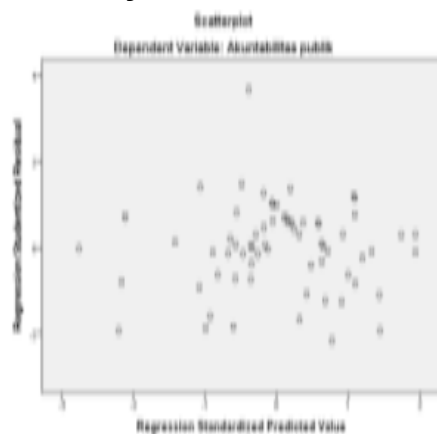
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin Watson
1	,890 ^a	,792	,782	2,592	1,431

Sumber : Data Olahan 2017

Dari hasil pengujian autokorelasi menunjukkan nilai *Durbin Watson* terletak antara -2 dan +2 = $-2 < 1,431 < +2$. Dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya autokorelasi dalam model regresi.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Gambar 1
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Olahan 2017

Dari grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta penyebarannya terletak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Tabel 5
Hasil Analisis Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	16,786	2,631		6,380	,000
Pengawasan Fungsional (X1)	,301	,087	,333	3,476	,001
Penyajian Laporan Keuangan (X2)	,536	,106	,483	5,069	,000
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X3)	,488	,166	,195	2,937	,005

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Publik

Sumber : Data Olahan 2017

Berdasarkan hasil perhitungan program spss tersebut, maka diperoleh persamaan regresi berganda yaitu sebagai berikut:

$$Y = 16,786 + 0,301(X_1) + 0,536(X_2) + 0,488(X_3) + e$$

Keterangan:

Y: Akuntabilitas publik

X₁: Pengawasan fungsional

X₂: Penyajian laporan keuangan

X₃: Aksesibilitas laporan keuangan

Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Tabel 6
Hasil Analisis Regresi Secara Parsial Hipotesis Pertama

Variabel Independen	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig.	Keterangan
Pengawasan Fungsional	3,476	1,998	0,001	H ₁ diterima

Sumber : Data Olahan 2017

Dari tabel tersebut diketahui nilai t_{tabel} 1,998 pada tingkat signifikan 5%. Berdasarkan uji regresi, diketahui nilai t_{hitung} 3,476 dengan signifikansi 0,001. Dengan demikian dapat dilihat bahwa t_{hitung} > t_{tabel} yaitu 3,476 > 1,998 dengan nilai signifikansi diperoleh

adalah $0,001 < 0,05$, maka hasil penelitian ini dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pengawasan fungsional yang efektif maka akuntabilitas publik akan terwujud. Sehingga dengan adanya pengawasan fungsional dapat mendorong terwujudnya akuntabilitas publik yang bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Cici Rahayu (2011) yang menemukan bahwa pengawasan fungsional memiliki pengaruh yang signifikan dan positif dalam mewujudkan akuntabilitas publik, dan juga penelitian yang dilakukan Indah Wulandari (2013) membuktikan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas publik.

Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Tabel 7
Hasil Analisis Regresi Secara Parsial Hipotesis Kedua

Variabel Independen	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig.	Keterangan
Penyajian Laporan Keuangan	5,069	1,998	0,000	H ₂ diterima

Sumber : Data Olahan 2017

Dari tabel tersebut diketahui nilai t_{tabel} 1,998 pada tingkat signifikan 5% . Berdasarkan uji regresi, diketahui nilai t_{hitung} 5,069 dengan signifikansi 0,000. Dengan demikian dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $5,069 > 1,998$ dengan nilai signifikan diperoleh sebesar $0,000 < 0,05$, maka hasil penelitian ini dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa dengan melalui penyajian laporan keuangan yang baik, pelaporan keuangan daerah akan dapat dipertanggungjawabkan sehingga pada akhirnya dapat

meningkatkan akuntabilitas publik. Hasil penelitian ini sejalan dengan Ni Made Suratmi, Nyoman Trisna Herawati, Nyoman Ari Surya Darmawan (2014) membuktikan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik. Selain itu, penelitian terkait juga dilakukan Peggy Sande (2013) dan Anies Iqbal Mustofa (2012) menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

Tabel 8
Hasil Analisis Regresi Secara Parsial Hipotesis Ketiga

Variabel Independen	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig.	Keterangan
Aksesibilitas Laporan Keuangan	2,937	1,998	0,005	H ₃ diterima

Sumber : Data Olahan 2017

Dari tabel tersebut diketahui nilai t_{tabel} 1,998 pada tingkat signifikan 5% . Berdasarkan uji regresi, diketahui nilai t_{hitung} 2,937 dengan signifikansi 0,005. Dengan demikian dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,937 > 1,998$ dengan nilai signifikan diperoleh sebesar $0,005 < 0,05$, maka hasil penelitian ini dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa dengan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan bagi para pengguna laporan keuangan maka akan mampu meningkatkan akuntabilitas publik. Dimana pemerintah melalui aksesibilitas laporan keuangan dapat menunjukkan akuntabilitas kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang mengandalkan informasi dalam laporan keuangan. Sehingga melalui

aksesibilitas laporan keuangan dapat meningkatkan akuntabilitas publik. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Suratmi, Nyoman Trisna Herawati, Nyoman Ari Surya Darmawan (2014), Alfin Gustian Akbar (2013), dan Yudi Kristianto (2011), yang menemukan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:67). Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 9 berikut :

Tabel 9
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,890 ^a	,792	,782	2,592	1,431

Sumber : Data Olahan 2017

Adjusted R Square sebesar 0,782 atau 78,2%. Ini menunjukkan bahwa akuntabilitas publik di SKPD Kabupaten Siak dapat dipengaruhi oleh faktor pengawasan fungsional, penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan sebesar 78,2%. Sedangkan sisanya sebesar 21,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak diamati dalam penelitian ini.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menemukan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Cici Rahayu (2011) yang menemukan bahwa pengawasan fungsional memiliki pengaruh yang signifikan dan positif dalam mewujudkan akuntabilitas publik, dan juga penelitian yang dilakukan Indah Wulandari (2013) membuktikan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas publik.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menemukan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. Hasil penelitian ini sejalan dengan Ni Made Suratmi, Nyoman Trisna Herawati, Nyoman Ari Surya Darmawan (2014) membuktikan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik. Selain itu, penelitian terkait juga dilakukan Peggy Sande (2013) dan Anies Iqbal Mustofa (2012) menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menemukan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Suratmi, Nyoman Trisna Herawati, Nyoman Ari

Surya Darmawan (2014), Alfin Gustian Akbar (2013), dan Yudi Kristianto (2011), yang menemukan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik.

Keterbatasan

1. Penelitian ini hanya menggunakan pengawasan fungsional, penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan sebagai indikator.
2. Penelitian ini hanya menggunakan objek penelitian SKPD di Kabupaten Siak.
3. Penelitian ini merupakan metode survei menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka saran yang diberikan adalah:

1. Dari hasil penelitian terlihat bahwa pengawasan fungsional, penyajian laporan keuangan, dan aksesibilitas laporan keuangan dalam pemerintahan dalam hal ini SKPD Kabupaten Siak telah baik dilakukan, tapi masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna sehingga hal ini akan berdampak pada rendahnya akuntabilitas publik.
2. Untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan dengan metode lain untuk mendapatkan data yang lengkap, misalnya dengan melakukan wawancara secara langsung dengan responden dalam pengisian kuesioner sehingga jawaban responden

lebih mencerminkan jawaban yang sebenarnya.

3. Bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti judul yang sama, maka peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan dan menggunakan variabel lain, karena dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan dapat menjelaskan sebesar 78,2%. Sedangkan 21,8% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Alfin Gustian. 2013. *Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STEI) Ekuitas. Bandung.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga, Jakarta.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Erlangga, Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.

- Kristianto, Yudi. 2011. *Pengaruh Aksesibilitas laporan Keuangan dan Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik (Studi pada Pemerintah Kota Bandung)*. Skripsi. Universitas Komputer Indonesia. Bandung.
- Laksana, Agung Puja., Bestari Dwi Handayani. 2014. Pengaruh Kejelasan Anggaran, Pengawasan Fungsional, dan Pelaporan Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik di Kabupaten Batang. *Accounting Analysis Journal* 3 (2).
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIEM YKPN.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta.
- Mustofa, Anies Iqbal. 2012. Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pematang. *Accounting Analysis Journal* 1 (1).
- N, Wahida. 2015. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara*. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Pekanbaru.bpk.go.id
- Rahayu, Cici. 2011. *Pengaruh Audit Kinerja Sektor Publik dan Pengawasan Fungsional Terhadap Akuntabilitas Publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Cimahi*. Skripsi. Universitas Komputer Indonesia. Bandung.
- Rohman, Abdul. 2009. Pengaruh Implementasi sistem Akuntansi, Pengelolaan keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah (Survey Pada Pemda di Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta*.
- Sande, Peggy. 2013. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)*. Artikel Skripsi. Universitas Negeri Padang. Padang.
- Suratmi, Ni Made., Nyoman Trisna Herawati, dan Nyoman Ari Surya Darmawan. 2014. Pengaruh Audit Kinerja, Penyajian Laporan Keuangan, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Publik. *E-*

journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.

Wasistiono, Sadu. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Fokusmedia, Bandung.

Wulandari, Indah. 2013. Pengaruh Pengawasan Fungsional dalam Menunjang Akuntabilitas Publik pada Pemerintah Kota Padang. *Artikel*. Universitas Negeri Padang.